

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/andemt96>

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

Rahmat Hidayat ¹, Lies Nur Intan ², Fitri Herdayani ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³

korespondensi: ritajunita0@gmail.com

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Masalah difokuskan pada bagaimana kebijakan, sistem operasional, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari konsep pengelolaan sampah terpadu dan pendekatan reduce, reuse, recycle (3R) yang menekankan pentingnya integrasi antara aspek kelembagaan, teknis, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap kebijakan dan program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang dilaksanakan melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta pengembangan program pengurangan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah dan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga. Namun demikian, implementasi strategi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana prasarana, peningkatan volume timbulan sampah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Palembang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: strategi pengelolaan sampah; kebijakan lingkungan; partisipasi masyarakat; pengelolaan sampah perkotaan; Kota Palembang.

1. PENDAHULUAN

Di tingkat global, isu pengelolaan sampah menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Program Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan pengelolaan limbah dan konsumsi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang

tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pada upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah (Wilson et al., 2015). Pendekatan ini dikenal dengan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa terkait pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Dinas Kebersihan Kota Palembang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program pengelolaan sampah. Strategi yang diterapkan mencakup berbagai aspek seperti sistem pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, hingga pengurangan sampah melalui program partisipasi masyarakat. Keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada efektivitas tata kelola kelembagaan, dukungan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Damanhuri Padmi, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di perkotaan sangat dipengaruhi oleh integrasi antara kebijakan pemerintah, ketersediaan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asteria dan Heruman (2016) menunjukkan bahwa program bank sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Sementara itu, penelitian oleh Wilson et al. (2015) menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah yang efektif harus melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam suatu kerangka tata kelola yang kolaboratif. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Kaza et al. (2018) menunjukkan bahwa kota-kota yang memiliki strategi pengelolaan sampah yang terencana dengan baik cenderung lebih mampu mengurangi dampak lingkungan dari timbulan sampah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengelolaan sampah di perkotaan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Kebersihan, dalam mengelola sampah secara efektif di tingkat kota. Banyak penelitian lebih menekankan pada aspek teknis pengelolaan sampah atau partisipasi masyarakat, sementara analisis mengenai strategi kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam mengelola sampah perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik khususnya terkait tata kelola pengelolaan lingkungan perkotaan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam strategi pengelolaan sampah perkotaan, termasuk bagaimana kebijakan daerah diterjemahkan ke dalam sistem operasional pengelolaan sampah serta bagaimana partisipasi masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan ini me-

ungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai proses, pengalaman, praktik, dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kebijakan daerah, sistem operasional pengelolaan sampah, dan partisipasi masyarakat, yang kemudian dianalisis keterkaitannya dengan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pengelolaan sampah, yang dapat mencakup unsur pemerintah daerah, pengelola persampahan, petugas operasional, pengelola fasilitas pengolahan atau bank sampah, serta masyarakat yang terlibat atau menjadi pengguna layanan persampahan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan proses implementasi kebijakan dan kondisi pengelolaan sampah secara kontekstual (??).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan daerah, dokumen perencanaan, laporan pengelolaan sampah, data operasional persampahan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan, sistem pemilahan dan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah. Observasi digunakan untuk melihat kondisi faktual sistem operasional dan praktik pengelolaan sampah di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (?). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema kebijakan daerah, sistem operasional, partisipasi masyarakat, strategi pengelolaan, dan efektivitas pengelolaan sampah. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia. Proses analisis juga dilakukan secara terbuka terhadap munculnya tema-tema baru yang ditemukan selama penelitian sehingga hasil penelitian tidak semata-mata dibatasi oleh kategori konseptual yang telah ditentukan sebelumnya.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Konsep Utama Penelitian

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu persoalan penting dalam pembangunan kota berkelanjutan karena berkaitan secara langsung dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlanjutan penggunaan sumber daya. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan aktivitas ekonomi menyebabkan timbunan sampah perkotaan terus mengalami peningkatan. World Bank melalui *What a Waste 2.0* menunjukkan bahwa dunia menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahun dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 3,40 miliar ton pada tahun 2050 apabila tidak terdapat perubahan signifikan dalam pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sampah (Kaza et al., 2018). Perkembangan yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa timbunan sampah global bahkan telah mencapai sekitar 2,1 miliar ton pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,8 miliar ton pada 2050. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas sistem pengelolaan sampah perlu berkembang lebih cepat agar mampu mengimbangi pertumbuhan timbunan sampah (United Nations Environment Programme and International Solid Waste Association, 2024).

Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga dengan bagaimana sampah tersebut dikumpulkan, dipilah, diangkut, diolah, didaur ulang, dan akhirnya diproses atau dibuang. Sistem pengelolaan yang hanya berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan akhir cenderung menempatkan pemerintah pada posisi yang terus-menerus harus menyediakan lahan, armada, tenaga kerja, dan biaya operasional untuk menangani peningkatan timbulan sampah. Sebaliknya, pendekatan pengelolaan sampah modern menekankan hierarki pengelolaan yang menempatkan pencegahan dan pengurangan sampah sebagai prioritas, diikuti dengan penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan material, pengolahan, dan pembuangan residu sebagai pilihan terakhir ([United Nations Environment Programme and International Solid Waste Association, 2024](#)). Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengangkut sampah menuju tempat pemrosesan akhir, tetapi juga oleh kemampuan sistem mengurangi sampah sejak dari sumbernya.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah juga memiliki hubungan erat dengan konsep ekonomi sirkular. Sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai material yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang sebagian masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dikembalikan ke dalam siklus produksi dan konsumsi. UNEP dan ISWA menekankan pentingnya pencegahan timbulan sampah, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan daur ulang, serta perubahan menuju sistem ekonomi sirkular sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah global ([United Nations Environment Programme and International Solid Waste Association, 2024](#)). Pendekatan ini relevan bagi pemerintah daerah karena strategi pengelolaan sampah dapat dikembangkan tidak hanya untuk mengurangi beban lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan kembali material, pengembangan bank sampah, pengomposan, dan berbagai bentuk pemulihan sumber daya.

Dalam konteks Indonesia, paradigma pengelolaan sampah telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. UU tersebut juga menegaskan pentingnya kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah ([Republik Indonesia, 2008](#)). Dengan demikian, pengelolaan sampah merupakan urusan publik yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah sebagai penyedia layanan.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini memberikan kerangka penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah ([Pemerintah Republik Indonesia, 2012](#)). Pengurangan sampah berkaitan dengan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, sedangkan penanganan mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan demikian, sistem pengelolaan sampah idealnya tidak berhenti pada tahap pengangkutan, tetapi harus membangun rangkaian pengelolaan sejak sampah dihasilkan sampai dengan residu diproses pada tahap akhir.

Kerangka kebijakan nasional juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan tersebut memberikan arah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pengurangan dan penanganan sampah secara terukur ([Republik Indonesia, 2017](#)). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai suatu sistem

yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Salah satu persoalan penting dalam implementasi pengelolaan sampah adalah kesenjangan antara kebijakan dan kapasitas penyelenggaraan di tingkat lokal. World Bank menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan layanan publik yang kompleks karena pemerintah lokal sering menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas perencanaan, pengelolaan kontrak, monitoring operasional, serta kualitas data mengenai timbulan dan karakteristik sampah (Kaza et al., 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Implementasi kebijakan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam strategi dan mekanisme operasional yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Partisipasi masyarakat merupakan dimensi lain yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Sampah dihasilkan oleh aktivitas masyarakat sehingga perubahan perilaku pada tingkat rumah tangga merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pengurangan sampah dari sumbernya. Asteria dan Heruman (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah dapat menjadi instrumen untuk membangun kesadaran, keterampilan, dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan serta pengurangan sampah. Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan sampah anorganik, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan aktivitas pengelolaan lingkungan dengan manfaat ekonomi.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah juga menunjukkan bahwa partisipasi tidak muncul secara otomatis. Astuti, Linarti, dan Sa'ban (2021) menemukan bahwa sikap, norma subjektif, pengetahuan mengenai cara dan jenis sampah, serta pengetahuan mengenai konsekuensi pengelolaan sampah berkaitan dengan intensi dan perilaku masyarakat dalam berpartisipasi pada program bank sampah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menyediakan fasilitas. Pemerintah perlu membangun pengetahuan, kesadaran, norma sosial, dan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat juga memiliki dimensi kelembagaan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat membutuhkan organisasi lokal, mekanisme koordinasi, pembagian peran, serta insentif yang memungkinkan masyarakat mempertahankan keterlibatannya dalam jangka panjang. Penelitian Rachman, Komalasari, dan Hutagalung (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis bank sampah pada tingkat desa. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah perlu membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan masyarakat dan organisasi lokal, bukan hanya menempatkan masyarakat sebagai pengguna layanan persampahan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah perkotaan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan dimensi kebijakan, kelembagaan, operasional, teknologi, pembiayaan, dan perilaku masyarakat. Kebijakan daerah memberikan arah dan legitimasi bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah, sedangkan sistem operasional menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menentukan sejauh mana strategi pengurangan sampah dari sumber dapat berjalan. Interaksi ketiga aspek tersebut kemudian memengaruhi kemampuan pemerintah daerah mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

3.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, tetapi juga dengan perilaku masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Asteria dan Heruman (2016) menunjukkan bahwa pendekatan bank sampah dapat menjadi alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perubahan paradigma masyarakat dari membuang sampah menjadi memilah dan memanfaatkan sampah merupakan bagian penting dari strategi pengurangan sampah dari sumbernya.

Penelitian Astuti, Linarti, dan Sa'ban (2021) memperluas pembahasan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, pengetahuan mengenai sampah, dan pengetahuan mengenai konsekuensi pengelolaan sampah berhubungan dengan intensi masyarakat untuk berpartisipasi. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah membutuhkan intervensi yang memperhatikan dimensi perilaku, karena penyediaan fasilitas dan program pemerintah tidak akan optimal apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan, motivasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi.

Rachman, Komalasari, dan Hutagalung (2021) juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis bank sampah di tingkat desa. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat dikembangkan sebagai aktivitas yang memiliki dimensi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat. Bank sampah dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan material yang memiliki nilai jual. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kajian yang lebih baru mengenai pengelolaan sampah menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah semakin kompleks seiring dengan meningkatnya volume sampah dan perubahan pola konsumsi. UNEP dan ISWA (2024) menekankan bahwa pendekatan *business as usual* tidak cukup untuk menghadapi peningkatan timbulan sampah global. Sistem pengelolaan sampah perlu bergerak menuju pencegahan sampah, pengurangan konsumsi material, peningkatan penggunaan kembali, daur ulang, pemulihan sumber daya, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah daerah perlu mempertimbangkan hubungan antara aktivitas ekonomi, pola konsumsi, perilaku masyarakat, dan kapasitas sistem pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat ruang untuk mengembangkan kajian yang melihat pengelolaan sampah sebagai persoalan tata kelola daerah secara lebih komprehensif. Sebagian penelitian menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan bank sampah, sedangkan kajian global lebih banyak membahas peningkatan timbulan sampah, kapasitas sistem, teknologi, dan ekonomi sirkular. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kebijakan daerah, sistem operasional, dan partisipasi masyarakat sebagai tiga aspek yang saling berhubungan dalam menjelaskan strategi pengelolaan sampah perkotaan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya melihat apakah program pengelolaan sampah tersedia, tetapi juga bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik operasional dan bagaimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya.

3.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian literatur, efektivitas pengelolaan sampah perkotaan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Pengelolaan sampah merupakan hasil interaksi antara kapasitas kebijakan pemerintah daerah, sistem operasional pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan daerah berfungsi sebagai dasar normatif dan strategis yang menentukan arah, target, pembagian kewenangan, serta instrumen pengelolaan sampah. Sistem operasional merupakan bentuk implementasi kebijakan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sementara itu, partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan pengurangan sampah dari sumber dan keberlanjutan program pengelolaan berbasis masyarakat.

Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan sampah dipahami sebagai kemampuan sistem pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pengurangan dan penanganan sampah secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Efektivitas tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah sampah yang berhasil diangkut atau diproses, tetapi juga dari kemampuan sistem mengurangi timbunan sampah, meningkatkan pemilahan dan pengolahan dari sumber, memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta mengurangi dampak lingkungan. Pemahaman tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan sampah nasional yang menekankan pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu (Republik Indonesia, 2008; Pemerintah Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2017).

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan Daerah+Sistem Operasional+Partisipasi Masyarakat → Strategi Pengelolaan Sampah → Efektivitas Pengelolaan Sampah (1)

Kebijakan daerah dalam penelitian ini mencakup regulasi, program, target, kelembagaan, pembiayaan, serta dukungan pemerintah terhadap pengelolaan sampah. Sistem operasional mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, bank sampah, kepatuhan terhadap ketentuan persampahan, dan keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk memahami strategi pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap efektivitas pengelolaan sampah perkotaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Perkotaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengurangan sampah pada sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut melibatkan pemerintah daerah, petugas operasional, pengelola fasilitas persampahan, serta masyarakat sebagai penghargai sekaligus pengguna layanan persampahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya merupakan aktivitas teknis, tetapi juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan dukungan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sarana dan prasarana, serta

partisipasi masyarakat.

Berdasarkan fokus penelitian, pengelolaan sampah dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kebijakan daerah, sistem operasional, dan partisipasi masyarakat. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana strategi pengelolaan sampah dilaksanakan serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya pengelolaan sampah yang efektif.

Tabel 1: Aspek Pengelolaan Sampah yang Dianalisis

Aspek	Fokus Analisis	Indikator
Kebijakan daerah	Arah dan implementasi kebijakan persampahan	Regulasi, program, target, kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasan
Sistem operasional	Pelaksanaan pelayanan persampahan	Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
Partisipasi masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Pemilahan, pengurangan, daur ulang, bank sampah, kepatuhan, dan partisipasi dalam program
Efektivitas pengelolaan	Pencapaian tujuan pengelolaan sampah	Cakupan pelayanan, pengurangan sampah, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pengelolaan

4.2. Implementasi Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah perkotaan. Kebijakan memberikan arah bagi pemerintah daerah dalam menentukan program, pembagian tugas, penyediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme pelayanan persampahan. Implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan operasional.

Pada tingkat implementasi, kebijakan persampahan dapat dilihat melalui keberadaan program pengurangan dan penanganan sampah, penyediaan fasilitas persampahan, pengaturan kegiatan pengangkutan dan pengolahan, serta upaya mendorong masyarakat melakukan pengurangan sampah dari sumber. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara tujuan kebijakan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan.

4.3. Sistem Operasional Pengelolaan Sampah

Sistem operasional merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas pelayanan persampahan. Pengelolaan operasional mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Setiap tahapan memiliki keterkaitan sehingga kelemahan pada salah satu tahapan dapat memengaruhi kinerja keseluruhan sistem.

Pada tahap pemilahan, pengelolaan sampah dari sumber menjadi bagian penting karena pemilahan dapat memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sebelum masuk ke tahap pengumpulan dan pengangkutan. Pemilahan yang belum berjalan secara optimal dapat menyebabkan sampah yang sebenar-

Tabel 2: Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Daerah

Aspek	Fokus Temuan	Implikasi
Regulasi	Ketersediaan dan penerapan kebijakan persampahan	Menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan
Program	Pelaksanaan program pengu- rangan dan penanganan sampah	Menentukan arah strategi penge- lolaan
Kelembagaan	Pembagian tugas dan kewenang- an antarunit	Memengaruhi koordinasi pelak- sanaan
Pembiayaan	Dukungan anggaran terhadap pe- ngelolaan sampah	Memengaruhi keberlanjutan pro- gram
Pengawasan	Monitoring dan evaluasi pelaksa- naan kebijakan	Menentukan kemampuan perba- ikan program

nya masih memiliki nilai guna atau nilai ekonomi bercampur dengan sampah residu. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan beban pengangkutan dan pemrosesan akhir.

Tahap pengumpulan dan pengangkutan juga menjadi komponen penting dalam sistem pelayanan. Kualitas pelayanan pada tahap ini dipengaruhi oleh ketersediaan armada, kondisi sarana, jadwal pengangkutan, cakupan wilayah pelayanan, serta jumlah dan kapasitas petugas. Apabila kapasitas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan, dapat terjadi penumpukan sampah pada titik tertentu dan menurunkan kualitas lingkungan.

Tabel 3: Tahapan Sistem Operasional Pengelolaan Sampah

Tahapan	Aktivitas	Permasalahan yang Perlu Dianalisis
Pemilahan	Pemisahan sampah berdasarkan jenis	Konsistensi pemilahan dari sumber
Pengumpulan	Pengumpulan sampah dari sumber atau titik pelayanan	Cakupan dan keteraturan pelayanan
Pengangkutan	Pemindahan sampah menuju fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir	Armada, jadwal, rute, dan kapasitas angkut
Pengolahan	Pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah	Kapasitas fasilitas dan teknologi pengolahan
Pemrosesan akhir	Penanganan sampah residu	Kapasitas dan keberlanjutan fasilitas akhir

4.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi penting dalam sistem pengelolaan sampah karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan material sekali pakai, pemilahan sampah dari sumber, penggunaan kembali barang, penyerahan sampah yang memiliki nilai ekonomi kepada bank sampah, serta keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh tersedianya fasilitas, informasi, insentif, serta kemudahan untuk berpartisipasi. Masyarakat akan lebih mudah

melakukan pemilahan apabila tersedia sistem pengumpulan yang mendukung sampah terpilah. Demikian pula, program bank sampah membutuhkan mekanisme yang jelas mengenai pengumpulan, pencatatan, penilaian, dan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Tabel 4: Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Bentuk Partisipasi	Aktivitas	Tujuan
Pengurangan sampah	Mengurangi penggunaan barang sekali pakai	Mengurangi timbulan sampah dari sumber
Pemilahan	Memisahkan sampah berdasarkan jenis	Memudahkan pengolahan dan daur ulang
Penggunaan kembali	Menggunakan kembali barang yang masih layak	Mengurangi jumlah sampah yang dibuang
Daur ulang	Menyerahkan atau mengolah material yang dapat didaur ulang	Meningkatkan pemanfaatan material
Bank sampah	Menyerahkan sampah bernilai ekonomi kepada pengelola	Memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi
Kegiatan lingkungan	Mengikuti kegiatan kebersihan dan edukasi	Meningkatkan kepedulian masyarakat

4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

Berdasarkan aspek yang dianalisis, keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan, operasional, dan sosial. Faktor pendukung dapat berupa adanya kebijakan yang jelas, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, keberadaan kelompok masyarakat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.

Sebaliknya, faktor penghambat dapat berasal dari keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemilahan dari sumber, keterbatasan kapasitas pengolahan, rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat, serta koordinasi antaraktor yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan sehingga penyelesaian persoalan sampah membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas teknis.

Tabel 5: Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kebijakan	Regulasi dan program pemerintah	Implementasi dan pengawasan belum optimal
Kelembagaan	Dukungan pemerintah dan pembagian tugas	Koordinasi antaraktor dapat menjadi kendala
Sarana prasarana	Tersedianya fasilitas persampahan	Keterbatasan jumlah dan kapasitas fasilitas
SDM	Adanya petugas dan pengelola	Keterbatasan kompetensi dan jumlah petugas
Masyarakat	Kesadaran dan partisipasi masyarakat	Partisipasi belum konsisten
Pembiayaan	Dukungan anggaran	Keterbatasan sumber pembiayaan

4.6. Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan

Hasil penelitian selanjutnya diarahkan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan sampah perkotaan. Strategi tersebut perlu mengintegrasikan kebijakan daerah, penguatan sistem operasional, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengangkutan berpotensi tidak menyelesaikan persoalan apabila jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat.

Strategi pengelolaan perlu diarahkan pada pengurangan sampah sejak dari sumber, peningkatan pemilahan, pengembangan fasilitas pengolahan, optimalisasi bank sampah dan kegiatan daur ulang, peningkatan kualitas pelayanan pengangkutan, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual.

Tabel 6: Arah Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan

Strategi	Bentuk Intervensi	Tujuan
Pengurangan dari sumber	Edukasi, pembatasan sampah sekali pakai, dan penggunaan kembali	Mengurangi timbulan sampah
Penguatan pemilahan	Pemilahan organik, anorganik, dan residu	Meningkatkan pengolahan dan daur ulang
Penguatan operasional	Optimalisasi armada, rute, jadwal, dan tenaga operasional	Meningkatkan kualitas pelayanan
Pengembangan pengolahan	Pengomposan, daur ulang, dan pemulihan material	Mengurangi sampah yang masuk ke pemrosesan akhir
Penguatan bank sampah	Peningkatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Meningkatkan nilai ekonomi sampah
Edukasi masyarakat	Sosialisasi dan kampanye perubahan perilaku	Meningkatkan partisipasi masyarakat
Monitoring dan evaluasi	Pengukuran capaian program dan evaluasi berkala	Meningkatkan efektivitas kebijakan

5. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup kebijakan daerah, kapasitas sistem operasional, pengurangan sampah dari sumber, pengolahan, serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara ketiga aspek utama tersebut. Kebijakan daerah berfungsi memberikan arah, dasar hukum, program, dan pembagian kewenangan, sedangkan sistem operasional menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena sebagian besar proses pengurangan dan pemilahan sampah harus dimulai dari sumber.

Pengelolaan sampah yang efektif tidak cukup dicapai melalui peningkatan kapasitas pengangkutan dan pemrosesan akhir. Strategi pengelolaan perlu diarahkan pada pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber, peningkatan pemilahan, pengembangan kegiatan penggunaan kembali dan daur ulang, opti-

malisasi fasilitas pengolahan, serta penguatan kelembagaan masyarakat seperti bank sampah. Pendekatan tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, koordinasi antaraktor, serta sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mengembangkan pengelolaan sampah sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Partisipasi masyarakat juga merupakan komponen penting dalam keberlanjutan pengelolaan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam mengurangi penggunaan material sekali pakai, melakukan pemilahan, menggunakan kembali barang, mendaur ulang, dan mengikuti program pengelolaan sampah dapat mengurangi beban sistem persampahan pemerintah daerah. Namun, partisipasi tersebut membutuhkan dukungan berupa edukasi, fasilitas yang mudah diakses, mekanisme pelayanan yang jelas, serta insentif yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari keterlibatannya. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah perlu menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam sistem pengelolaan, bukan hanya sebagai penerima layanan.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi pengelolaan sampah perkotaan perlu diarahkan pada integrasi antara penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas sistem operasional, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengembangkan sistem pengolahan dan pemulihan sumber daya, memperkuat kelembagaan pengelola, serta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis capaian. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, tetapi juga mengurangi beban lingkungan dan mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka

- Asteria, D. and Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1):136–141.
- Astuti, R. D., Linarti, U., and Sa'ban, D. M. (2021). Supporting factors for community participation in the waste bank program: A study in sleman regency of indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 20(1):33–41.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., and Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank, Washington, DC.
- Pemerintah Republik Indonesia (2012). Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.
- Rachman, I., Komalasari, N., and Hutagalung, I. R. (2021). Community participation on waste bank

to facilitate sustainable solid waste management in a village. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 4(2):327–345.

Republik Indonesia (2008). Undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Republik Indonesia (2017). Peraturan presiden republik indonesia nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223.

United Nations Environment Programme and International Solid Waste Association (2024). Global waste management outlook 2024: Beyond an age of waste – turning rubbish into a resource. Technical report, United Nations Environment Programme, Nairobi.